

**TINJAUAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN APOTEK
KURNIA FARMA YANG MEMPERJUALBELIKAN OBAT KERAS
TANPA RESEP DOKTER DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Hamim Fahrudin¹, Ade Gunawan²

INTISARI

Penelitian ini meneliti praktik penjualan obat keras tanpa resep dokter di Apotek Kurnia Farma Kabupaten Lampung Tengah. Apotek Kurnia Farma beralamat di Desa Sinar Sari, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Praktik penjualan obat keras tanpa resep dokter di Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi akibat kurangnya *pengawasan dan penegakan peraturan* oleh pihak yang berwenang seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Kesehatan dan Organisasi Ikatan Apoteker di Kabupaten Lampung Tengah. Faktor yang mempengaruhi penjualan obat keras tanpa resep dokter oleh apotek dan konsumen adalah tingkat pemahaman yang rendah dari konsumen, kesulitan prosedur administratif bagi konsumen dalam memperoleh resep dokter dan biaya yang relatif mahal jika harus konsultasi kepada dokter, pengetahuan yang rendah dari asisten apoteker dan karyawan, dan adanya persaingan bisnis yang ketat sesama pengusaha apotek.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, yang menggabungkan kajian pustaka dengan observasi dan wawancara lapangan. Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Pada penelitian ini analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli obat keras tanpa resep dokter melanggar Pasal 1320 KUHPdata dan berbagai peraturan terkait, serta kode etik profesi apoteker. Apotek Kurnia Farma wajib mengganti kerugian konsumen sesuai Pasal 1365 KUHPdata dan dapat dikenakan sanksi pidana dan administratif. Saran dari penelitian ini meliputi peningkatan pengawasan dan penegakan hukum oleh BPOM dan Dinas Kesehatan, edukasi kepada apotek dan masyarakat, serta pengawasan dari Ikatan Apoteker Indonesia. Implementasi saran ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, melindungi konsumen, dan meningkatkan kualitas layanan kefarmasian di Kabupaten Lampung Tengah.

Kata Kunci : *Jual Beli Obat Keras Tanpa Resep Dokter, Lampung Tengah.*

¹ Mahasiswa Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

² Dosen Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Ahcmad Yani Yogyakarta.

**LEGAL REVIEW AND ACCOUNTABILITY OF APOTEK KURNIA FARMA
FOR SELLING PRESCRIPTION DRUGS WITHOUT A DOCTOR'S
PRESCRIPTION IN CENTRAL LAMPUNG DISTRICT**

Hamim Fahrudin¹, Ade Gunawan²

ABSTRACT

This research investigates the practice of selling prescription drugs without a doctor's prescription at Apotek Kurnia Farma in Central Lampung District. Apotek Kurnia Farma is located in Sinar Sari Village, Kalirejo Subdistrict, Central Lampung District. The practice of selling prescription drugs without a doctor's prescription in Central Lampung District often occurs due to lack of supervision and enforcement of regulations by authorities such as the National Agency of Drug and Food Control (BPOM), the Health Office, and the Indonesian Pharmacists Association in Central Lampung District. Factors influencing the sale of prescription drugs without a doctor's prescription by pharmacies and consumers include low understanding among consumers, administrative difficulties in obtaining a doctor's prescription, the relatively high cost of consulting a doctor, low knowledge among pharmacy assistants and employees, and intense business competition among pharmacy entrepreneurs.

This study uses a normative-empirical legal research method, combining literature review with field observations and interviews. The research approach used in this study is legislative and sociological. Qualitative data analysis is employed in this study. The research findings indicate that agreements for the sale of prescription drugs without a doctor's prescription violate Article 1320 of the Indonesian Civil Code and various related regulations, as well as the pharmacists' code of ethics. Apotek Kurnia Farma is obligated to compensate consumers for damages under Article 1365 of the Indonesian Civil Code and may face criminal and administrative sanctions. Recommendations from this research include enhancing supervision and law enforcement by BPOM and the Health Office, educating pharmacies and the public, and oversight by the Indonesian Pharmacists Association. Implementation of these recommendations is expected to improve compliance with regulations, protect consumers, and enhance pharmaceutical service quality in Central Lampung District.

Keywords : *Buying and Selling Hard Drugs Without a Doctor's Prescription, Central Lampung.*

¹ Law Study Program (S-1) Student at Jenderal Achmad Yani University, Yogyakarta.

² Lecturer in the Law Study Program (S-1) at Jenderal Achmad Yani University, Yogyakarta.